

PENENTUAN SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DI KOTA AMBON

Louisa S. Manuhutu

Fakultas Pertanian Universitas Darussalam Ambon

Email : susan.manuhutu@yahoo.co.id

ABSTRACT

Regional economic development is essentially a series of activities carried out by vernmen area, together with the communities in managing and utilizing existing resources optimally to stimulate regional economic development in order to improve living standards for people in the area. Gross Regional Domestic Product (GDP) in Indonesia essentially consists of nine sectors, namely (1) the agricultural sector; (2) mining and quarrying; (3) processing industry; (4) electricity, gas and water; (5) building and construction; (6) trade, hotels and restaurants; (7) transport and communications; (8) the financial, leasing and business services; and (9) services. This study aims to determine the basic sector and non base in Ambon City. Metodo data analysis used in this research is the analysis of LQ (Location Quatient) to measure the concentration rather than something or industrial activity in a region by comparing its role in the economy of the area with industrial activities same role in the national economy. The results of the analysis of LQ (determination of the basic sector and non-base) of the sectors of the economy shows that are included in the basic sector is the sector of transport and communications, financial services, leasing and business services, the services sector and the sector of electricity, gas and water supply. They include the sector while the non bases are agriculture, mining and quarrying, manufacturing and construction sector.

Keywords : *Location Quatient, Sector Base, Non Bases*

1. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan sangat diperlukan untuk mengenyahkan kemiskinan. Perencanaan merupakan satu-satunya jalan yang terbuka bagi negara-negara berkembang untuk menaikkan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, untuk mengurangi ketimpangan/ kesenjangan pendapatan serta kesejahteraan untuk meningkatkan lapangan kerja dan sebagainya (Bachrawi Sanusi, 2000).

Pembangunan nasional maupun pembangunan daerah sangat berdampak bagi perkembangan perekonomian dari sector-sektor ekonomi. Sektor-sektor tersebut bukan hanya sebagai penyumbang dalam pembentukan produk nasional, tetapi juga memberikan lapangan kerja utama bagi penduduk. Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila ditunjang dari segi pengetahuan masyarakat yang tinggi, adanya sumber daya alam yang cukup memadai yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar guna tercapainya kemajuan pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkain kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerin tah daerah, bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) di Indonesia pada dasarnya terdiri atas sembilan sektor, yaitu (1) sektor pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air minum; (5) bangunan

dan konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (9) jasa-jasa

Kota Ambon dalam kedudukan sebagai ibukota Propinsi Maluku memiliki posisi yang cukup strategis karena berada di tengah-tengah propinsi Maluku. Dalam kedudukannya yang strategis tersebut, maka Kota Ambon mempunyai fungsi, selain sebagai pusat pemerintahan Propinsi dan Kota, juga sebagai pusat pelayanan terhadap daerah belakang, iklim tropis dan iklim musim karena di kelilingi oleh laut. Letak pulau Ambon sebagai pusat komunikasi antar wilayah, pusat kegiatan industri, dan pusat pemukiman. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 luas wilayah Kota Ambon seluruhnya 377 Km² yang terdiri dari luas daratan 359,45 Km² dan lautan seluas 17,55 Km². Jumlah penduduk Kota Ambon pada tahun 2007 berjumlah 271.972 jiwa, meningkat sebesar 3,35 persen dari tahun sebelumnya.

Hal ini sangat mempengaruhi potensi sumberdaya alam yang ada di masing-masing wilayah. Dari segi rentang kendali dan pelayanannya sangat efektif dalam masyarakat, karena segala kebutuhan mudah diperoleh. Di sisi lain dari segi pemanfaatan sumberdaya alam dari sisi basis ekonomi potensi-potensi daerah mengalami perubahan dari segi pemanfaatannya disebabkan karena pemekaran wilayah kecamatan di ikuti pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur guna menunjang kebutuhan masyarakat dan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan demikian akan mempengaruhi tingkat

produksi yang di hasilkan dari wilayah yang berbasis ekonomi.

Kondisi ini sangat mempengaruhi bagi perkembangan sektor ekonomi melalui pendekatan Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon. Perkembangan atau pertumbuhan suatu sektor perlu di ketahui mengingat bahwa bahwa penyebab pokok terjadinya kesenjangan antar wilayah pada suatu negara memiliki wilayah yang luas adanya perbedaan dalam struktur industri atau sektor. (Budiharsono,2005).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kota Ambon. Tujuan yang hendak dicapai adalah Untuk menentukan sektor basis dan non basis Kota Ambon Tahun 2002-2011.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sektor – Sektor Ekonomi

Perencanaan pembangunan suatu wilayah akan sangat ditentukan keberhasilannya dengan kemampuan untuk menentukan pengembangan pada sector-sector yang sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk itu maka penentuan dan pemilihan terhadap sector-sector mana yang akan dikembangkan adalah mutlak diperlukan demi keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Dalam perhitungan pendapatan nasional Indonesia menurut lapangan usaha, BPS membagi sektor produksi atas 11 lapangan usaha. Namun untuk keperluan analisis, lapangan usaha tersebut dapat dikelompokkan lagi ke dalam kelompok yang lebih bersifat agregatif (Susanti dkk, 1995).

Lebih lanjut Susanti dkk (1995) juga mengemukakan bahwa, umumnya 11 lapangan usaha ini dikelompokkan lagi menjadi 3 sektor produksi, 4 sektor produksi atau 6 sektor produksi. Ada 3 cara lazim digunakan untuk mengelompokkan 11 lapangan usaha menjadi 3 sektor produksi. Cara pertama disebut dengan cara pengelompokkan versi tahun 1930-an. Berdasarkan cara ini, kesebelas lapangan usaha tersebut dikelompokkan atas : 1). Sektor primer; 2). Sektor sekunder; 3). Sektor tersier. Cara kedua, yang disebut dengan cara 1950-an yang diperkenalkan oleh Simon Kuznets. Dalam melakukan pengelompokkan, Kuznets membagi lapangan usaha atas : 1). Sektor pertanian; 2). Sektor industri; 3). Sektor jasa. Pengelompokkan cara ketiga, yaitu pengelompokkan versi 1970-an, diperkenalkan oleh Bank Dunia.

Pengelompokkan lapangan usaha menjadi empat sektor produksi, cara yang digunakan oleh Chenery dan Syrquin. Keempat sector menurut pengelompokkan mereka meliputi: 1). Sektor primer; 2). Sektor industri; 3). Sektor utilitas; 4). Sektor jasa.

Terakhir adalah pembagian atas 6 sektor. Pembagian ini merupakan cara yang digunakan dalam penyusunan Repelita Indonesia. Untuk keperluan tersebut lapangan usaha dikelompokkan atas : 1). Sektor pertanian; 2). Sektor pertambangan; 3). Sektor industri;

4). Sektor bangunan; 5). Sektor pengangkutan; dan 6). Sektor lainnya (meliputi sektor listrik, gas dan air minum, perdagangan, rumah makan dan hotel, dan lain-lain).

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2006), lapangan usaha atau sektor ekonomi dibagi atas 9 lapangan usaha, meliputi : 1). Sektor pertanian; 2). Sektor pertambangan dan penggalian; 3). Sektor industri pengolahan; 4). Sektor listrik, gas dan air bersih; 5). Sektor bangunan/konstruksi; 6). Sektor perdagangan, hotel dan restoran; 7). Sektor angkutan dan komunikasi; 8). Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; 9). Sektor jasa. Khusus untuk sector pertanian terbagi lagi menjadi sub-sub sektor yang meliputi : 1). Sub sektor tanaman bahan makanan; 2). Sub sektor tanaman perkebunan; 3). Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya; 4). Sub sektor kehutanan; dan 5). Sub sektor perikanan.

Menurut Suripto (2000) indikator-indikator dalam menilai suatu sector-sector unggulan antara lain:

1. Sektor yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap PDRB
2. Sektor-sector yang merupakan sektor basis dengan melihat nilai Location Quentien (LQ), dimana harus lebih dari 1 (satu).
3. Sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi
4. Sektor yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah lain.

Suritno (2003) merincikan kriteria-kriteria diatas sebagai berikut:

1. Masukkan terhadap PDRB: yaitu dikatakan unggul apabila sector tersebut memberikan kontribusi minimal 10% terhadap PDRB dan 2,5% untuk sub sector.
2. Nilai LQ : dikatakan unggul apabila sector dan sub sector tersebut mempunyai nilai lebih dari 1.
3. Pertumbuhan PDRB : dikatakan unggul apabila rata-rata pertumbuhan sector dan sub sector tersebut minimal 5% per tahun, dan mengalami pertumbuhan positif setidaknya selama 3 tahun, atau mengalami kenaikan berturut-turut selama 2 tahun terakhir.
4. Selisih antara pertumbuhan share sector/ sub sector terhadap PDRB wilayah kajian dan wilayah yang lebih besar bernilai positif.

2.2. Model Ekonomi Basis

Inti dari model ekonomi basis (*economic base model*) bahwa arah dan pertanian ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor tersebut berupa barang-barang dan jasa, termasuk tenaga kerja. Akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran oleh orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak (*immobile*), seperti yang berhubungan dengan aspek geografi, iklim, peninggalan sejarah, atau daerah pariwisata. Sektor yang bersifat seperti ini disebut sector basis. Tenaga kerja dan pendapatan pada sector basis adalah fungsi permintaan dari luar

(*exogenous*), yaitu permintaan dari luar yang mengakibatkan terjadinya ekspor dari wilayah tersebut.

Disamping sektor basis, ada kegiatan-kegiatan sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani kegiatan sektor basis itu sendiri. Kegiatan sektor pendukung, misalnya seperti perdagangan dan pelayanan perseorangan, disebut dengan sektor non-basis.

Teori ekonomi basis ini hanya mengklarifikasi seluruh kegiatan ekonomi kedalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Jadi tenaga kerja (pendapatan) sektor basis ditambah tenaga kerja (pendapatan) sektor non-basis sama dengan tenaga kerja (pendapatan) wilayah.

Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non-basis dapat digunakan beberapa metode, yaitu : (1). Metode pengukuran langsung, dan (2). Metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran langsung dapat dengan survey langsung untuk mengidentifikasi sektor mana yang merupakan sektor basis. Akan tetapi metode ini memerlukan biaya, waktu dan tenaga kerja yang banyak. Mengingat hal tersebut sebagian besar pakar ekonomi wilayah menggunakan metode pengukuran tidak langsung. Beberapa metode pengukuran tidak langsung, yaitu: (1). Metode melalui pendekatan asumsi; (2). Metode *location quotient*; (3). Metode kombinasi antara pendekatan asumsi dan *location quotient*; dan (4). Metode kebutuhan minimum.

Kadariah (1985), *Location Quotient* mengukur konsentrasi dari pada sesuatu kegiatan atau industri di suatu daerah dengan jalan membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan industri yang sama dalam perekonomian nasional.

Metode *Location Quotient* (LQ) merupakan perbandingan antara pangsa relative pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pangsa relative pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat nasional terhadap pendapatan (tenaga kerja) nasional.

Kelemahan metode ini adalah kegagalannya untuk menghitung ketidakseragaman dan produktifitas nasional secara menyeluruh. Kemudian metode ini mengabaikan fakta bahwa sebagian produksi nasional adalah untuk orang asing yang tinggal di wilayah tersebut (Budiharsono,2005).

Kelemahan-kelemahan dari metode ini hendaknya tidak terlalu ditonjolkan, karena disamping itu juga mempunyai dua kebalikan penting. *Pertama*, ia memperhitungkan ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. *Kedua*, metode ini tidak mahal dan dapat diterapkan pada data historid untuk mengetahui trend. Walaupun teori basis mengandung kelemahan-kelemahan, namun sudah banyak studi empirik yang dilakukan dalam rangka usaha memisah-misahkan sektor basis dari sektor bukan basis suatu daerah.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Richardson (1997), bahwa analisis basis sesungguhnya adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis, tetapi kelangkaan data pendapatan regional (studi di Inggris) telah mengakibatkan indicator-indikator yang bersifat kira – kira terpaksa digunakan, biasanya berupa kesempatan kerja (*employment*), penjualan, dan nilai tambah atau rekening upah. Karena *employment* bersifat diskontinu maka ia tidak begitu peka sebagai indikator perubahan-perubahan kegiatan basis. Pendapatan regional akan langsung mengalami kenaikan apabila basis mengalami perluasan, sedangkan kenaikan *employment* baru terasa dalam jangka panjang.

3. METODOLOGI

3.1. Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari segi sumber perolehan data, atau darimana berasal, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang pengumpulannya dilakukan oleh kantor-kantor sensus dan statistik, departemen-departemen dan instansi pemerintah lainnya (Mubyarto dan Suratno, 1981). Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Dikumpulkan langsung pada Badan Pusat Statistik daerah Kota Ambon dan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, berupa data Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku, dari 2002 sampai dengan tahun 2011
- b. Sumber-sumber pustaka yang sesuai dengan topik/bahasan yang diteliti, data ini berupa penunjang, pelengkap dan penyempurnaan.

3.2. Variabel Penelitian

- Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ambon dan Propinsi Maluku untuk tiap sektor atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dari tahun 2002-2011

3.3. Metoda Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan model-model sebagai berikut. alat analisis yang digunakan sebagai berikut :

- *Location Quotient* (LQ)

$$LQ = \frac{X_i / X_t}{Y_i / Y_t} \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

- X_i = PDRB Sektor A (sejenis) di suatu daerah
- X_t = Total PDRB daerah tersebut
- Y_i = PDRB Sektor A (sejenis) secara regional/nasional (daerah patokan)
- Y_t = Total PDRB regional/nasional (daerah patokan)

Keterangan :

- Apabila LQ suatu sektor > 1 , maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sedangkan bila LQ sektor < 1 maka sektor tersebut merupakan sektor non-basis.
- PDRB yang digunakan dalam perhitungan berdasarkan atas dasar harga konstan (adhk) dan atas dasar harga berlaku (adhb) menurut lapangan usaha di Kota Ambon.
- PDRB yang digunakan dalam perhitungan berdasarkan atas dasar harga konstan (adhk) dan atas dasar harga berlaku (adhb) menurut lapangan usaha di Propinsi Maluku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diantara tehnik-tehnik analisa tersebut yang tergolong sederhana ialah penggunaan "*Location Quotion*". Hubungan ekonomi sesuatu daerah di bagi dalam dua golongan, yaitu : (1). Sektor (industri) yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun pasar di luar daerah itu dan (2). Industri-industri (sektor) yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri. Industri yang termasuk golongan pertama disebut sektor (industri *basic*) sedangkan yang termasuk golongan kedua disebut sektor non *basic*.

Dasar pemikiran dari pada penggunaan tehnik ini merupakan teori *economic base* yang maknanya sebagai berikut: Karena industri *base* itu menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan hasil ke luar daerah itu mendatangkan arus pendapatan ke dalam daerah tersebut. Arus pendapatan ini menyebabkan baik kenaikan konsumsi maupun kenaikan investasi di daerah itu, yang pada gilirannya dapat menaikkan pendapatan lagi dan kesempatan kerja. Jika di daerah itu terdapat pengangguran, maka kesempatan kerja yang baru itu dapat menampungnya, atau jika daerah itu tidak terdapat pengangguran, maka daerah itu mempunyai daya tarik bagi orang-orang dari luar daerah yang mencari pekerjaan.

Kenaikan pendapatan di daerah itu tidak hanya menaikkan permintaan terhadap hasil industri *basic* melainkan juga akan menaikkan permintaan terhadap hasil *local non basic*, dan permintaan ini pada gilirannya akan menaikkan investasi yang induced sebagai akibat kenaikan pendapatan di industri-industri *basic*.

Sektor (industri) *basic* inilah yang patut di perembangkan di daerah. Yang pertama-tama harus di lakukan ialah menggolongkan tiap industri (sektor) dalam suatu daerah ke dalam salah satu dari kedua golongan tersebut. Untuk keperluan inilah maka *Location Quotion* di pakai. *Location Quotion* ini mengukur konsentrasi dari pada sesuatu kegiatan atau industri di suatu daerah dengan jalan membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan sektor (industri) yang sama dalam perekonomian nasional (Kadariah, 1985). Metode

Location Quotion di maksudkan untuk mengetahui mana yang termasuk sektor basis dan sektor non basis pada suatu wilayah. Perhitungan analisis *Location Quotion* (LQ) di maksudkan untuk melihat sektor-sektor mana saja yang merupakan sektor basis di Kota Ambon.

Hasil membuktikan bahwa di Kota Ambon selama periode tahun 2002-2011 (berdasarkan harga konstan) terlihat bahwa yang merupakan sektor basis yaitu sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran ; sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio dari keempat sektor ekonomi yang menunjukkan nilai koefisien *location quotion* (LQ) lebih dari satu ($LQ > 1$). Nilai LQ untuk sektor pengangkutan dan komunikasi adalah sebesar 1,8 ($LQ = 1,8$), sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,3 ($LQ = 1,3$), sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah 1,0 ($LQ = 1,0$), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,5 ($LQ = 1,5$) dan sektor jasa-jasa adalah 1,4 ($LQ = 1,4$).

Sektor pengangkutan dan komunikasi sebagai sektor basis dalam perekonomian Kota Ambon di sebabkan karena arus masuk orang dari dan keluar daerah sangat banyak dan juga fungsi pelayanan telekomunikasi berupa sarana dan prasarana telepon menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Empat sektor lainnya seperti sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa, keempat sektor ini telah memberikan sumbangan atau telah memberikan kontribusi untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ambon sehingga tidak mengherankan jika ketiga sektor ini menjadi sektor basis.

Sedangkan empat sektor lainnya, yakni: sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan adalah sektor ekonomi yang di klasifikasikan sebagai sektor non basis dalam perekonomian Kota Ambon. Dimana nilai koefisien LQ dari sektor-sektor ekonomi tersebut adalah kurang dari satu ($LQ < 1$). Berdasarkan hasil analisis *location quotion* (LQ) koefisien nilai untuk sektor pertanian adalah sebesar 0.5 ($LQ = 0.5$), sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0.1 ($LQ = 0.1$), sektor industri pengolahan sebesar 0.4 ($LQ = 0.4$), dan sektor bangunan sebesar 0.5 ($LQ = 0.5$). Ini menunjukkan bahwa keempat sektor ini hanya bisa menerima ekspor dari daerah lain.

Tabel 4.1
 Nilai LQ Sektor-Sektor Ekonomi Kota Ambon Tahun 2002-2011

Sektor	LOCATION QUATION (LQ)										Rerata	Kriteria
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
1	0.57	0.56	0.6	0.5	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.5	Bukan Basis
2	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.1	Bukan Basis
3	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.4	Bukan Basis
4	1.34	1.33	1.3	1.3	1.3	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.3	Basis
5	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.5	Bukan Basis
6	0.99	0.98	0.97	0.97	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.0	Basis
7	1.81	1.84	1.86	1.87	1.85	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.8	Basis
8	1.55	1.54	1.52	1.51	1.49	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.5	Basis
9	1.48	1.46	1.44	1.43	1.42	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.4	Basis

Sumber : Hasil Analisis Data PDRB Kota Ambon

Keterangan :

1. Pertanian
2. Pertambangan & Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik & Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel & Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-Jasa.

Dari hasil perhitungan LQ mempunyai nilai lebih dari satu dan dikatakan sebagai sektor basis, sektor basis ini menghasilkan barang dan jasa selain mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar di dalam wilayah Kota Ambon juga dapat keluar wilayah Kota Ambon baik melalui perdagangan antar wilayah maupun perdagangan antar pulau dan bahkan perdagangan luar negeri.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil analisis LQ (penentuan sektor basis dan non basis) dari sektor-sektor ekonomi menunjukkan bahwa yang termasuk dalam sektor basis adalah sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, Sektor jasa-jasa dan Sektor listrik, gas dan air bersih. Sedangkan yang termasuk dalam sektor non basis adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan.

5.2. Saran

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Ambon dalam upaya meningkatkan PDRB lebih mengutamakan pengembangan sektor basis dan non

basis terutama sektor basis yaitu sektor angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa – jasa dan listrik, gas` dan air bersih. Sektor-sektor ini memberikan kontribusi yang tinggi dalam perekonomian Kota Ambon sehingga perlu mendapatkan prioritas pengembangan dengan tidak mengabaikan sektor- lainnya, sehingga dalam jangka pendek, menengah atau jangka panjang dapat memberikan dampak yang tinggi bagi peningkatan kesejahteraan di Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2013. *Pendapatan Regional Kota Ambon*, Badan Pusat Statistik Kota Ambon.
- Anonimous, 2006. *Pendapatan Regional Kota Ambon*, Provinsi Maluku.
- Budiharsono, S. 2005. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut*, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kadariah, 1985. *Ekonomi Perencanaan*, Penerbit: Fakultas Ekonbomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mubyarto dan Suratno, 1981. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Penerbit: Yayasan Agro Ekonomika, Yogyakarta.

Richardson, W.H, 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.